

Penguatan Kapasitas Bawaslu dan Panwascam dalam Evaluasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

ABSTRACT

Pemungutan Suara Ulang (PSU) in regional head elections is a corrective instrument provided by regulations to ensure that the principles of democracy remain preserved, particularly regarding electoral integrity and fairness. In this context, supervision of PSU becomes a crucial aspect to guarantee that the process is conducted in accordance with the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. This community service activity aims to provide conceptual and applicative understanding to the Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) of Pesawaran Regency and the Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) throughout Pesawaran Regency, with emphasis on the perspective of public administration science. This program was motivated by findings that, although the supervision mechanism of PSU has generally been carried out according to formal procedures, there are still several technical and institutional problems in the implementation of its evaluation. The approach used in this activity is participatory, with the main technique being Forum Group Discussion (FGD) to encourage two-way dialogue and collective reflection on field experiences. The results of this activity show that strengthening institutional capacity is an urgent need, particularly in aspects of governance, evaluative documentation, and cross-level coordination. Thus, Bawaslu Pesawaran is expected to be able to carry out its role more effectively in ensuring the quality of PSU supervision in the future.

Keyword: Pemungutan Suara Ulang, PSU, Bawaslu, Panwascam.

ABSTRAK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah merupakan instrumen korektif yang disediakan oleh regulasi untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga, khususnya dalam hal integritas dan keadilan pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap PSU menjadi aspek krusial guna menjamin bahwa proses berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pesawaran dengan menitikberatkan pada perspektif keilmuan administrasi public. Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa meskipun mekanisme pengawasan PSU secara umum telah dijalankan sesuai dengan prosedur formal, namun masih terdapat sejumlah persoalan teknis dan kelembagaan dalam pelaksanaan evaluasinya. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatoris dengan Teknik utama berupa Forum Group Discussion (FGD) untuk mendorong dialog dua arah dan refleksi bersama atas pengalaman di lapangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam aspek tata Kelola, dokumentasi evaluatif serta koordinasi lintas Tingkat. Dengan demikian, Bawaslu Pesawaran diharapkan

mampu menjalankan perannya secara lebih efektif dalam memastikan kualitas pengawasan PSU di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, PSU, Bawaslu, Panwascam.

PENDAHULUAN

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme korektif yang diatur dalam perundang-undangan sebagai upaya untuk menjaga integritas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran terjadi sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Situasi ini menekankan pentingnya kapasitas evaluasi dalam pengawasan untuk memastikan hasil PSU bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu mengingat PSU bukan merupakan bagian utama dalam pemilihan kepala daerah, maka perlu adanya penguatan peran dan kapasitas aktor-aktor kunci dalam proses evaluasi pengawasan, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Pesawaran. Mereka berada di garis depan dalam memastikan PSU berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan individu, terutama pada level Panwascam masih menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan kunci berupa rendahnya literasi politik terkait dengan substansi dan urgensi evaluasi pada proses PSU. Literasi yang lemah ini dapat berdampak pada lemahnya hasil dari proses evaluasi pengawasan PSU. Padahal, evaluasi yang baik sangat penting sebagai basis pembelajaran kelembagaan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam perspektif Administrasi Publik, tantangan tersebut dapat dikaji melalui beberapa konsep kunci. Seperti konsep kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), yaitu kemampuan suatu organisasi public dalam mengelola sumber daya, informasi dan wewenangnya untuk menjalankan fungsi

secara efektif dan berkelanjutan. Kapasitas ini mencakup struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, prosedur kerja yang efisien serta dukungan teknologi dan informasi yang memadai (Farazmand, 2019). Dalam konteks pengawasan PSU, kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan Bawaslu dan Panwascam untuk bertindak secara profesional dalam menghasilkan evaluasi yang berbasis data dan akurat. Bawaslu dan Panwascam sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu perlu memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan peran pengawasan PSU hingga tuntas. Selanjutnya, pendekatan akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk pengawasan PSU. Akuntabilitas tidak hanya berarti pelaporan administratif.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan pemilu melalui forum evaluasi PSU. Kegiatan ini berupaya membangun ruang reflektif dan edukatif bagi Bawaslu dan Panwascam dalam memahami peran strategis mereka sekaligus mendorong peningkatan kapasitas analisis dan partisipasi kritis dalam mengawal pelaksanaan PSU yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan Focus Group Discussion dengan mengintegrasikan penyampaian materi, refleksi evaluatif dan simulasi pengawasan yang berbasis kasus aktual dari PSU Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dikaji dalam pengabdian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana Tingkat literasi politik anggota Panwascam se-Kabupaten Pesawaran terkait mekanisme dan urgensi PSU? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi Bawaslu dan Panwascam dalam melakukan evaluasi pengawasan PSU?, dan (3) Bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat kapasitas dan peran Bawaslu dan Panwascam dalam forum evaluasi pengawasan PSU agar lebih akuntabel?

Sementara, hal yang menjadi luaran dalam pengabdian ini mencakup: (1) peningkatan kapasitas literasi politik kelembagaan pengawasan PSU, khususnya bagi anggota Bawaslu dan Panwascam Kabupaten Pesawaran, (2) penguatan jejaring kolaboratif antara akademisi dan penyelenggara pemilu dalam

mendorong pemilu yang akuntabel dan partisipatif, dan (3) adanya publikasi ilmiah pengabdian pada jurnal nasional terakreditasi sebagai bentuk diseminasi praktik penguatan kapasitas berbasis keilmuan administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Instrumen utama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan pendekatan partisipatoris dengan melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Panwascam se-Kabupaten Pesawaran sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Metode yang dipilih adalah Focus Group Discussion (FGD) yang disusun untuk menggali pengalaman dan refleksi peserta terkait pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Panduan ini berisi pemaparan terstruktur mengenai literasi politik, mekanisme evaluasi pengawasan PSU serta tantangan kelembagaan yang dihadapi Bawaslu dan Panwascam. Selain itu, disiapkan pula skenario simulasi berbasis kasus aktual PSU di Kabupaten Pesawaran untuk mendorong diskusi reflektif untuk menghadirkan dinamika, interaksi, argumentasi dan pola koordinasi antar peserta.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, melalui pelaksanaan FGD yang diikuti oleh perwakilan Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Panwascam dari seluruh kecamatan. Kedua melalui observasi partisipatif, dimana pengabdian mengamati secara langsung interaksi peserta, pola komunikasi serta respons terhadap materi dan simulasi.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi, kategorisasi isu dan penyusunan rekomendasi strategis yang selanjutnya dipresentasikan kembali kepada peserta untuk mendapatkan validasi bersama. Proses penyajian data dilakukan secara naratif melalui penyusunan laporan hasil pengabdian yang berisi ringkasan temuan, strategi penguatan kapasitas dan

usulan tindak lanjut kelembagaan. Dengan metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi ajang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang kolaborasi reflektif antara akademis dan pengawas pemilu untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengawal PSU secara akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui Forum Group Discussion (FGD) berhasil mengidentifikasi persoalan utama dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Peserta, yang terdiri dari anggota Bawaslu dan Panwascam menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai urgensi PSU sebagai instrumen korektif untuk menjaga integritas demokrasi. Diskusi juga memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan, terutama literasi politik, dokumentasi evaluatif, serta koordinasi lintas tingkatan kelembagaan.

Hasil pengabdian memperkuat temuan Farazmand (2019) yang menekankan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam konteks pengawasan PSU, kelembagaan pengawas pemilu membutuhkan struktur organisasi yang adaptif, sumber daya manusia yang kompeten serta prosedur kerja yang efisien agar fungsi evaluasi dapat berjalan optimal. Di Pesawaran, tantangan utama justru muncul pada keterbatasan SDM panwascam yang masih minim literasi politik sehingga berimplikasi pada lemahnya analisis evaluatif.

Selain itu, temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik (Romzek & Dubnick 1987) yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat. Dalam forum FGD, peserta menyadari bahwa laporan evaluasi pengawasan PSU belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas, baik segi, kelengkapan data maupun konsistensi pelaporan. Hal ini menunjukkan

perlunya penguatan kapasitas dokumentasi kelembagaan agar evaluasi dapat digunakan sebagai basis pembelajaran kelembagaan.

Lebih lanjut, pendekatan kolaboratif yang melibatkan akademisi dalam forum pengabdian ini memperlihatkan relevansinya dengan konsep collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), dimana pengambilan keputusan publik dapat diperkuat melalui interaksi dialogis dan reflektif antara aktor negara dan non-negara. Kolaborasi tersebut memungkinkan peserta untuk membangun strategi pengawasan PSU yang lebih adaptif, misalnya melalui gagasan penggunaan teknologi sederhana untuk dokumentasi, serta peningkatan jejaring komunikasi Panwascam.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan literasi politik peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu dan Panwascam dalam menjalankan fungsi evaluasi PSU yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.



Gambar 1: Foto bersama kegiatan



Gambar 2: Pelaksanaan pengabdian



Gambar 3 Pelaksanaan pengabdian.

Sumber: Bawaslu Pesawaran

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan panwascam se-kabupaten Pesawaran dalam pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berhasil memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi politik dan pemahaman kelembagaan. Melalui metode Forum Group Discussion (FGD), peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai urgensi PSU, tetapi juga terlibat aktif dalam refleksi pengalaman lapangan serta perumusan strategi pengawasan yang lebih akuntabel. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kelemahan utama masih terletak pada aspek literasi politik, dokumentasi evaluatif serta koordinasi lintas tingkat, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun ruang kolaborasi antara akademisi dan pengawas pemilu, yang membuka peluang tindak lanjut dalam bentuk riset, pelatihan berkelanjutan dan publikasi akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Farazmand, A. (2019). *Handbook of governance in the 21st century*. Routledge.
- Kim, S., & Lee, J. (2020). Citizen participation and transparency in local government: Do institutional arrangements matter? *Public Management Review*, 22(6), 907–928.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26 (7), 1095–1113.

- Norris, P., & Grömping, M. (2020). *Electoral integrity worldwide: Causes and consequences of electoral malpractice*. Oxford University Press.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Setiawan, K., & Savirani, A. (2016). Electoral governance in Indonesia: The shift from state to society. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1(3), 226–243.
- Svara, J. H., & Denhardt, J. V. (2016). *The connected community: Local governments as partners in citizen engagement and community building*. Routledge.
- Tans, R. D., & Hiariej, E. (2015). Electoral governance and democratic consolidation in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 37(2), 224–254.
- Wibowo, A., & Fitriani, R. (2021). Strengthening institutional capacity of election supervisors in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 90–101.